BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teori dan Konsep

1. Manajemen Kurikulum

a. Pengertian Manajemen

Manajemen dapat dikatakan sebagai profesi karena diperlukan keahlian khusus yang harus dimiliki oleh manajer dan dituntut untuk bekerja secara profesional serta mampu meningkatkan profesionalitasnya baik melalui pendidikan maupun pelatihan agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Oleh karena itu, seorang manajer harus membekali diri dengan kemampuan konseptual yang berkaitan dengan *planning, organizing, actuating*, dan *controlling* serta kemampuan sosial yang mengatur tentang hubungan manusiawi sehingga mampu menerapkan gaya kepemimpinan yang tepat dalam berbagai situasi dan kondisi, dan kemampuan teknis yang dapat mendukung dalam pelaksanaan program-program sekolah atau madrasah yang telah direncanakan sebelumnya.[24]

Manajemen yang dikemukakan oleh George. R Terry bahwasanya *Management is a distinct process consisting of planning,*

[24] Prim Masrokan Mutohar, *Manajemen Pendidikan*….., 10

organizing, actuating, and controlling, performed to determine and accomplish stated objectives by the use of human beings and other resources. Manajemen merupakan sebuah proses yang khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan: perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan dan pengawasan, yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber-sumber lain. Manajemen adalah ilmu pengetahuan ataupun seni.[25]

Dalam buku lainnya, George. R. Terry menyatakan bahwa manajemen adalah mencakup kegiatan untuk mencapai tujuan, dilakukan oleh individu-individu yang menyumbangkan upayanya yang terbaikmelalui tindakan-tindakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal tersebut meliputi pengetahuan tentang apa yang harus mereka lakukan, menetapkan cara bagaimana melakukannya, memahami bagaimana mereka harus melakukannya dan mengukur efektivitas dari usaha-usaha mereka.[26]

Para ahli mempunyai pendapat yang berbeda tentang fungsi dari manajemen. Namun pada dasarnya fungsi dari manajemen adalah: perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penggerakan

[25] George R Terry. Leslie W Rue, *Dasar-dasar Manajemen*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 1992), 10

[26] George. R. Terry, *Prinsip-prinsip Manajemen*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), 9.

(*actuating*), dan pengawasan (*controlling*).[27] Penjelasan secara lebih rinci adalah sebagai berikut:

1) Perencanaan (*planning*)

Perencanaan adalah proses penentuan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai dan menetapkan jalan dan sumber yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu. Menurut Roger A Kauffman (1972) yang dikutip oleh Nanang Fattah bahwa dalam setiap perencanaan selalu terdapat tiga kegiatan yang meskipun dapat dibedakan, tetapi tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya. Ketiga kegiatan itu adalah (1) perumusan tujuan yang ingin dicapai (2) pemilihan program untuk mencapai tujuan itu (3) identifikasi dan pengerahan sumber yang jumlahnya selalu terbatas.

2) Pengorganisasian (*organizing*)

Pengorganisasian adalah sistem kerja sama sekelompok orang yang dilakukan dengan pembidangan dan pembagian seluruh pekerjaan atau tugas dengan menentukan sejumlah satuan atau unit kerja, yang menghimpun pekerjaan sejenis dalam satu satuan atau unit kerja.

3) Penggerakan (*actuating*)

Penggerakan adalah menempatkan semua anggota dari pada kelompok agar bekerja secara sadar untuk mencapai suatu

[27] Burhanuddin, *Analisis Administrasi Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan* (Bumi Aksara: Jakarta, 1994), 165-167.

tujuan yang ditetapkan sesuai dengan perencanaan dan pola organisasi.

4) Pengawasan(*controlling*)

Pengawasan adalah proses pengamatan atau pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Dari beberapa pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa manajemen mengandung beberapa pengertian antara lain:

a) Manajemen sebagai suatu proses.
b) Manajemen sebagai suatu aktifitas orang-orang yang melakukan aktifitas manajemen.
c) Manajemen sebagai suatu seni sekaligus sebagai suatu ilmu yang akan dipelajari.

Manajemen merupakan suatu proses sosial yang direncanakan untuk menjamin kerjasama, partisipasi, intervensi dan keterlibatan orang lain dalam mencapai sasaran tertentu, yang telah ditetapkan dengan efektif.[16]

Setelah menelaah berbagai pengertian tentang manajemen di atas, maka dapat disimpulkan bahwasannya manajemen adalah suatu proses menata dan menggerakkan sumber-sumber potensial baik yang bersifat manusia maupun non manusia untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Dari pengertian ini dapat

diberikan penjelasan dalam bentuk gambar sebagai berikut:[28]

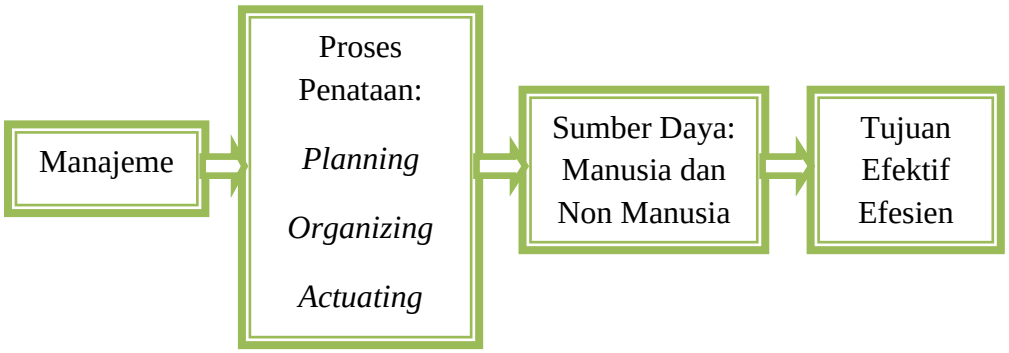

Gambar 1.1 Artikulasi Manajemen secara umum

Berdasarkan rumusan pengertian manajemen di atas, terdapat beberapa penjelasan sebagai berikut:

a) Adanya proses, hal ini menunjukkan bahwa dalam manajemen adanya suatu tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan oleh seorang manajer.
b) Adanya menata, berkaitan erat dengan makna manajemen secara etimologis yaitu *"to manage"* yang berarti mengelola, mengatur dan menata.
c) Adanya upaya untuk menggerakkan, setelah diatur dan ditata dengan baik perlu dilaksanakan secara profesional. Dalam hal ini seorang manajer harus selalu memberikan bantuan, dukungan, dan dorongan agar para staf dan bawahannya bisa bekerja secara profesional.
d) Adanya sumber-sumber potensial yang harus dilibatkan baik yang bersifat manusia maupun non manusia. Dalam melibatkan

[28] Prim Masrokan Mutohar, *Manajemen Pendidikan* ….., 12

sumber daya manusia perlu memperhatikan keahlian dan profesionalitas, sedangkan sumber daya yang lain juga perlu diperhatikan mutu dan kualitasnya.

e) Adanya tujuan yang harus dicapai, tujuan yang ada harus disepakati oleh keseluruhan anggota organisasi. Hal ini agar semua sumber daya manusia mempunyai tujuan yang sama dan selalu berusaha untuk mensukseskannya. Dengan demikian, tujuan yang ada dapat dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan aktivitas dalam organisasi.

f) Tujuan harus dicapai secara efektif dan efisien. Hal ini dimaksudkan agar para staf organisasi berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan disepakati dalam organisasi.[29]

b. Pengertian Kurikulum

Secara etimologis istilah kurikulum (*curriculum*) berasal dari bahasa Yunani, yaitu *curir* yang artinya "pelari" dan *curere* yang berarti "tempat berpacu". Istilah kurikulum berasal dari dunia olahraga, terutama dalam bidang atletik pada zaman romawi kuno di Yunani. Dalam bahasa Prancis, istilah kurikulum berasal dari kata *courier* yang berarti berlari (*to run*). Kurikulum berarti suatu jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari dari garis start sampai dengan garis finish untuk memperoleh medali atau penghargaan.

[29] Prim Masrokan Mutohar, *Manajemen Pendidikan*….., 12

Jarak yang harus ditempuh tersebut kemudian diubah menjadi program sekolah dan semua orang yang terlibat di dalamnya. Dalam konteks pendidikan kurikulum berarti jalan terang yang dilalui oleh pendidik dengan peserta didik untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap serta nilai-nilai.[30]

Dalam pengertian sempit, kurikulum merupakan seperangkat rencana, pengaturan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar-mengajar di sekolah. Pengertian ini menggaris bawahi adanya empat komponen dalam kurikulum yaitu: tujuan, isi, organisasi, serta strategi.[31] Sedangkan dalam pengertian yang lebih luas kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.[32] Pengertian ini menggambarkan bahwa segala bentuk aktivitas sekolah yang dapat mengembangkan potensi peserta didik adalah kurikulum, baik sebagai produk, program, materi pelajaran, pengalaman siswa, dan tidak hanya terbatas pada kegiatan belajar mengajar saja.

Menurut Nana Syaodih Sukmadinata, kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman

[30] S. Nasution, *Asas-asas Kurikulum*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), 1.
[31] Muhaimin, *Wacana Pengembangan Pendidikan Islam* …., 182.
[32] UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003.

penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.[33] Sedangkan menurut Rusman manajemen kurikulum adalah suatu sistem pengelolaan kurikulum yang kooperatif, komprehensif, sistemik, dan sistematik dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum.[34]

Mulyasa juga mengemukakan bahwa manajemen kurikulum adalah suatu kegiatan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian kurikulum.[35] Selain itu, Mustari juga mengemukakan bahwa manajemen kurikulum merupakan pengaturan yang dilakukan untuk keberhasilan kegiatan belajar mengajar (dalam istilah sekarang adalah pembelajaran), agar kegiatan tersebut dapat mencapai hasil maksimal.[36]

Berdasarkan definisi kurikulum di atas maka dapat disimpulkan bahwasanya kurikulum merupakan suatu program pendidikan yang disediakan oleh lembaga pendidikan baik pendidikan formal maupun nonformal untuk peserta didik agar memperoleh hasil belajar yang efektif dan efisien serta hasil yang sesuai dengan tujuan lembaga pendidikan.

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwasanya manajemen kurikulum merupakan usaha sistematis yang dilakukan

---

[33] Nana Syaodih Sukmadinata, *Kurikulum dan Pembelajaran Kompetensi*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), 23.

[34] Rusman, *Manajemen Kurikulum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 3.

[35] E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah; Konsep, Strategi, dan Implementasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 40.

[36] Mohamad Mustari, *Manajemen Pendidikan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 57.

seseorang melalui aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum. selain itu agar memperlancar pencapaian tujuan pembelajaran maka perlu dititikberatkan pada usaha, yaitu usaha dalam meningkatkan kualitas interaksi belajar mengajar.

c. Fungsi Manajemen Kurikulum

Dalam fungsi manajemen kurikulum juga terdapat perencanaan kurikulum, pengorganisasian kurikulum, implementasi kurikulum, dan evaluasi kurikulum sebagai alat program dalam pelaksaan kurikulum untuk meningkatkan mutu pendidikan. Berikut merupakan beberapa fungsi manajemen kurikulum:

1) Perencanaan Kurikulum

Perencanaan kurikulum adalah suatu proses sosial yang kompleks menuntut berbagai jenis dan tingkat pembuatan keputusan. Perencanaan kurikulum berfungsi sebagai pedoman atau alat manajemen yang berisi petunjuk tentang jenis dan sumber individu yang diperlukan, media pembelajaran yang digunakan, tindakan-tindakan yang perlu dilakukan, sumber biaya, tenaga, dan sarana yang diperlukan, sistem *monitoring* dan evaluasi, peran unsur-unsur ketenagaan untuk mencapai tujuan manajemen lembaga pendidikan.

Menurut Terry, perencanaan merupakan kegiatan memilih dan menghubungkan kenyataan dalam kita, membayangkan dan

merumuskan tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk mencapai hasil yang diinginkan.[37] Sedangkan menurut Robbins dan Coulter mendefinisikan perencanaan merupakan sebuah proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi, menentukan strategi untuk pencapaian tujuan organisasi tersebut secara menyeluruh, serta merumuskan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi hingga tercapainya tujuan organisasi.[38]

Tujuan perencanaan kurikulum dikembangkan dalam bentuk kerangka teori dan penelitian terhadap kekuasaan soasial, pengembangan masyarakat, merencanakan kurikulum dan keputusan tersebut harus mengarah pada spesifikasi berdasarkan kriteria. Merencanakan pembelajaran merupakan bagian penting dalam perencanaan kurikulum karena mempunyai pengaruh terhadap siswa dari pada kurikulum itu sendiri.[39]

Menurut Oemar Hamalik, dalam perencanaan kurikulum harus memperhatikan yang pertama, berkenaan dengan kenyataan adanya gap atau jarang antara ide-ide strategi dan pendekatan yang dikandung oleh suatu kurikulum dengan usaha-usaha pelaksanaannya. Gap ini disebabkan oleh masalah keterlibatan personal dalam perencanaan kurikulum yang banyak

[37] Panglaykim, *Manajemen Suatu Pengantar*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1991), 78.
[38] Ernie Tisnawati Sule, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Kencana, 2009), 96.
[39] Rusman, *Manajemen Kurikulum*, (PT. Raja GrafindoPersada, Seri II ,2009), 21.

begantung pada pendekatan perencanaan kurikulum yang dianut.[40]

Perencanaan kurikulum berkaitan dengan penetapan tujuan dan memberikan cara pencapaian tujuan tersebut Rusman berpendapat bahwa perencanaan adalah kesempatan-kesempatan belajar dalam arti untuk membina siswa ke arah perubahan tingkah laku yang diinginkan dan menilai sampai dimana perubahan-perubahan telah terjadi pada diri siswa.[41]

Menurut Agus Zainul Fitri, perencanaan kurikulum adalah proses melibatkan kegiatan pengumpulan, penyortiran, sintesis, dan seleksi informan yang relevan dari berbagai sumber. Informan kemudian digunakan untuk merancang dan mendesain pengalaman-pengalaman belajar yang memungkinkan peserta didik mencapai tujuan pembelajaran.[42]

Menurut Suryo Subroto, dalam proses perencanaan kurikulum yang harus dilakukan yaitu;

a) Berdasarkan kalender pendidikan dari Kementerian Pendidikan, sekolah menghitung hari kerja efektif untuk setiap mata pelajaran, menghitung hari libur, hari untuk ulangan dan hari kerja tidak efektif.

---

[40] Oemar Hamalik, *Manajemen Pengembangan Kurikulum*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), 149.

[41] Rusman, *Manajemen Kurikulum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 21.

[42] Agus Zaenul Fitri, *Manajemen Kurikulum Pendidikan Islam* (Bandung: Alfabeta, 2013), 3.

b) Menyusun Program Tahunan (Prota)

Program tahunan merupakan program umum setiap mata pelajaran untuk setiap kelas, yang dikembangkan oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan. Program ini perlu dipersiapkan dan dikembangkan oleh guru sebelum tahun ajaran karena merupakan pedoman bagi pengembangan program-program berikutnya, yakni program semester, program mingguan dan program harian.

c) Menyusun Program Semester (Promes)

Adapun hal-hal pokok yang perlu diperhatikan dalam kegiatan ini adalah program semester harus sudah lebih jelas dari prota, yaitu dijelaskan dalam beberapa jumlah standar kompetensi dan kompetensi dasar, bagaimana cara menyelesaikannya, kapan diajarkan melalui tatap muka atau tugas.

d) Menyusun Silabus

Dalam kegiatan ini guru harus menyusun rencana secara rinci mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, pengalaman belajar dan sistem penilaian yang dilakukan untuk mengetahui pencapaian tujuan pengajaran.

e) Menjabarkan silabus menjadi Rencana Pembelajaran (RP)

Kegiatan dalam tahap ini adalah mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar yang esensial yang sukar

dipahami oleh siswa dijadikan sebagai prioritas untuk dipelajari dalam tatap muka/laboratorium. Adapun yang tidak begitu sukar, maka guru menjadikan tugas siswa secara individu atau kelompok.

f) Rencana Program Pembelajaran (RPP)

Dalam kegiatan ini guru membuat rincian pelajaran untuk satu kali tatap muka. Adapun yang penting dalam Rencana Pembelajaran adalah bahwa harus ada catatan kemajuan siswa setelah mengikuti pelajaran, hal ini penting untuk menjadi dasar pelaksanaan evaluasi rencana pembelajaran berikutnya.[43]

Perencanaan kurikulum ini berfungsi sebagai pedoman atau alat manajemen yang berisi petunjuk tentang jenis dan sumber individu yang diperlukan, media pembelajaran yang digunakan, tindakan-tindakan yang perlu dilakukan, sumber biaya, tenaga dan sarana yang diperlukan, sistem monitoring dan evaluasi, peran unsur-unsur ketenagaan untuk mencapai tujuan manajemen lembaga pendidikan. Di samping itu, perencanaan kurikulum juga berfungsi sebagai pendorong untuk melaksanakan sistem pendidikan sehingga mencapai hasil optimal.[44]

[43] B Suryosubroto, *Manajemen Pendidikan di Sekolah,* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 46-47.

[44] Rusman, *Manajemen Kurikulum……,*21

2) Pengorganisasian Kurikulum

Organisasi kurikulum merupakan pola atau desain bahan kurikulum yang bertujuan untuk memudahkan siswa dalam mempelajari bahan pelajaran dan memudahkan siswa dalam melakukan kegiatan belajar sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai secara aktif. Salah satu aspek yang perlu dipahami dalam pengembangan kurikulum yaitu aspek yang berkaitan dengan organisasi kurikulum. Organisai kurikulum merupakan pola atau desain bahan kurikulum yang tujuannya untuk memudahkan siswa dalam mempelajari bahan pelajaran serta memudahkan siswa dalam melakukan kegiatan belajar sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif.

Menurut Siagian *organizing* merupakan keseluruhan pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas, kewenangan dan tanggung jawab dalam sedemikian rupa, sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kegiatan kesatuan yang telah ditetapkan dalam suatu organisasi. Terkait dengan *organizing* ini, Ernes Dale memberikan gambaran terkait proses dalam melaksanakan *organizing* diataranya:[45]

a) Menentukan tugas-tugas apa yang dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi.
b) Membagi seluruh beban kerja menjadi kegiatan-kegiatan

[45] Nanang Fattah, *Landasan Manajemen Pendidikan*, (Bandung; PT. Remaja Rosdakarya, 1999), 71-72.

yang dapat dilaksanakan oleh perorangan atau kelompok. Disini perlu diperhatikan bahwa orang-orang yang akan diserahi tugas harus berdasarkan pada kulifikasi, tidak dibebani terlalu berat dan juga tidak terlalu ringan.

c) Menggabungkan pekerjaan para anggota dengan cara yang rasional dan efisien. Pengelompokan tugas akan saling berkaitan, jika organisasi sudah membesar atau kompleks. Penyatuan kerja ini biasanya disebut *departementalisasi*.

d) Menetapkan mekanisme kerja untuk mengkoordinasikan pekerjaan dalam satu kesatuan yang harmonis. Pada saat setiap orang dan setiap bagian melaksanakan pekerjaan atau aktivitas, kemungkinan timbul konflik di antara anggota dan mekanisme pengkoordinasian memungkinkan setiap anggota organisasi untuk tetap bekerja efektif.

e) Melakukan *monitoring* dan mengambil langkah-langkah penyesuaian untuk mempertahankan dan meningkatkan efektivitas. Karena pengorganisasian merupakan suatu proses yang berkelanjutan, diperlukan penelitian ulang terhadap keempat langkah sebelumnya secara terprogram/berkala, untuk menjamin konsistensi, efektif, dan efisien dalam memenuhi kebutuhan.

Selain itu, organisasi kurikulum sangat berkaitan dengan pengaturan bahan pelajaran yang ada pada kurikulum, sedangkan

yang menjadi sumber bahan pelajaran dalam kurikulum adalah nilai budaya, nilai sosial, aspek siswa dan masyarakat, serta ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menurut Rusman, faktor yang harus dipertimbangkan dalam organisasi kurikulum di antaranya berkaitan dengan ruang lingkup (*scope*), urutan bahan (*squence*), kontinutitas, keseimbangan dan keterpaduan (*integrated*).

a) Ruang lingkup dan urutan bahan pelajaran

   Ruang lingkup dan urutan bahan pelajaran merupakan keseluruhan materi pelajaran dan pengalaman yang harus dipelajari siswa. Ruang lingkup bahan pelajaran sangat tergantung pada tujuan pendidikan yang hendak dicapai. Dalam hal ini yang menjadi pertimbangan dalam penentuan materi pelajaran adalah adanya integrasi antara aspek masyarakat (yang mencakup nilai budaya dan sosial) dengan aspek siswa (yang mencakup minat, bakat dan kebutuhan).

b) Kontinuitas kurikulum

   Kontinuitas kurikulum, berhubungan dengan kesinambungan bahan pelajaran tiap mata pelajaran, pada tiap jenjang sekolah dan materi pelajaran yang terdapat dalam mata pelajaran yang bersangkutan. Kontinuitas ini dapat bersifat kuantitatif dan kualitatif. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan dalam pengorganisasian kurikulum adalah yang

berkaitan dengan substansi bahan yang dipelajari siswa, agar jangan sampai terjadi pengulangan ataupun loncat-loncat yang tidak jelas tingkat kesukarannya.

c) Keseimbangan bahan pelajaran

Keseimbangan bahan pelajaran adalah faktor yang berhubungan dengan bagaimana semua mata pelajaran itu mendapatkan perhatian yang layak dalam komposisi kurikulum yang akan diprogramkan pada siswa. Keseimbangan dalam kurikulum dapat ditinjau dari dua segi yakni keseimbangan isi atau apa yang dipelajari, dan keseimbangan cara atau proses belajar. Oleh sebab itu, dalam pengorganisasian kurikulum keseimbangan substansi isi kurikulum harus dilihat secara komprehensif untuk kepentingan siswa sebagai individu, tuntutan masyarakat, maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam penentuan bahan pelajaran, aspek estetika, intelektual, moral, sosialemosional, personal, religius, seni-aspirasi dan kinestetik, semuanya harus terakomodasi dalam isi kurikulum.

d) Alokasi waktu

Alokasi waktu, dalam hal ini yang menjadi perhatian adalah alokasi waktu yang dibutukan dalam kurikulum harus sesuai dengan jumlah materi yang disediakan. Oleh karena itu,

dibutuhkan penyusunan kalender pendidikan untuk mengetahui secara pasti jumlah jam tatap muka masing-masing pelajaran merupakan hal yang terpenting sebelum menetapkan bahan pelajaran.[46]

3) Implementasi Kurikulum

Implementasi kurikulum adalah usaha merealisasikan ide, konsep, dan nilai-nilai yang terkandung dalam kurikulum tertulis menjadi kenyataan. Implementasi kurikulum juga dapat diartikan sebagai aktualisasi kurikulum tertulis (*written curriculum*) dalam bentuk pembelajaran. berikut adalah beberapa faktor yang empengaruhi implementasi kurikulum yaitu: a) karakteristik kurikulum, b) strategi implementasi, karakteristik penilaian, c) pengetahuan guru tentang kurikulum, d) keterampilan mengarahkan.[47]

Berdasarkan hasil temuan di atas di dukung oleh teori yang di kemukakan Agus Zaenul Fitri bahwa pelaksanaan kurikulum merupakan suatu proses penerapan konsep, ide, program, atau tatanan kurikulum ke dalam praktik pembelajaran atau diharapkan untuk berubah. Pelaksanaan kurikulum juga merupakan proses interaksi antara fasilisator sebagai

[46] Rusman, *Manajemen Kurikulum* ……, 60-61.
[47] S. Hamid Hasan, *Evaluasi Kurikulum,* (Bandung: Remaja Rosyadakarya, 2009), 11.

pengembang kurikulum dan peserta didik sebagai subjek belajar.[48]

Untuk mengimplementasikan kurikulum sesuai dengan rancangan yaitu dibutuhkan beberapa kesiapan terutama kesiapan pelaksana. Sebagus apapun desain atau rancangan kurikulum yang dimiliki, tetapi keberhasilan sangat tergatung kepada guru. Kurikulum yang sederhana pun apabila gurunya memiliki kemampuan, semangat, dan dedikasi yang tinggi, maka akan mengahasilkan hasil yang lebih baik dari pada desain kurikulum yang bagus tetapi kemampuan, semangat, dan dedikasi gurunya rendah.[49] Jadi, guru adalah kunci utama kesuksesan implementasi kurikulum yang dapat didukung oleh sumber daya pendidikan lainnya seperti sarana dan prasarana, biaya, oraganisasi, lingkungan, yang merupakan kunci keberhasilan pendidikan akan tetapi guru tetaplah kunci utama keberhasilannya. Kemampuan-kemampuan yang harus dimiliki dan dikuasai oleh guru dalam mengimplementasikan kurikulum adalah sebagai berikut:[50]

Pertama, pemahaman esensi dari tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam kurikulum. Apakah tujuannya diarahkan pada penguasaan ilmu, teori, atau konsep; penguasaan kompetensi kerja; ditujuan pada penguasaaan kemampuan memecahkan

[48] Agus Zaenul Fitri, *Manajemen Kurikulum Pendidikan Islam*……, 39.
[49] Rusman, *Manajemen Kurikulum* ……, 74-75.
[50] *Ibid*, 75-76.

masalah, pembentukan pribadi yang utuh. Penguasaan esensi dari tujuan kurikulum sangat mempengaruhi penjabarannya, baik dalam penyusunan rancangan pengajaran maupun dalam pelaksanaan kurikulum (pengajaran).

Kedua, kemampuan untuk menjabarkan tujuan-tujuan kurikulum tersebut menjadi tujuan yang lebih spesifik. Tujuan yang dirumuskan dalam kurikulum masih bersifat umum, perlu dijabarkan pada tujuan yang lebih spesifik. Tujuan yang bersifat konsep perlu dijabarkan pada aplikasinya, tujuan yang bersifat kompetensi dijabarkan pada performansi, tujuan pemecahaan masalah atau pengembangan yang bersifat umum. Dijabarkan pada pemecahan atau pengembangan yang lebih spesifik.

Ketiga, kemampuan untuk menerjemahkan tujuan khusus kepada kegiatan pembelajaran. Konsep atau aplikasi konsep perlu diterjemahkan kedalam aktivitas pembelajaran, bagaimana pendekatan atau metode pembelajaran untuk menguasai konsep atau mengembangkan/melatih kemampuan menerapkan konsep. Kompetensi menunjukkan kecakapan, keterampilan, kebiasaan, oleh karena itu, model atau metode pembelajaran yang digunakan adalah model-model atau metode yang bersifat kegiatan atau perbuatan.

4) Evaluasi Kurikulum

Menurut Hamid Hasan, evaluasi kurikulum dan evaluasi pendidikan memiliki karakteristik yang tak terpisahkan. Karakteristik adalah lahirnya berbagai definisi untuk suatu istilah teknis yang sama. Hal tersebut disebabkan filosofi keilmuan yang dianut seseorang berpengaruh terhadap metodologi evaluasi, tujuan evaluasi dan pada gilirannya terhadap pengertian evaluasi.[51]

Evaluasi dinyatakan sebagai suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis, yang bertujuan untuk membantu pendidik memahami dan menilai suatu kurikulum, serta memperbaiki metode pendidikan. Evaluasi merupakan suatu kegiatan untuk mengetahui dan memutuskan apakah program yang telah ditentukan sesuai dengan tujuan semula.[52]

Rumusan evaluasi dapat dikatakan sebagai suatu proses yang sistematis dari pengumpulan, analisis dan interprestasi informasi/data untuk menentukan sejauh mana siswa telah mencapai tujuan pembelajaran. Evaluasi juga merupakan suatu pemeriksaan secara terus-menerus untuk mendapatkan informasi yang meliputi siswa, guru, program pendidikan, dan proses belajar mengajar untuk mengetahui tingkat perubahan siswa dan

[51] S. Hamid Hasan, *Evaluasi Kurikulum*, 16.
[52] Oemar Hamalik, *Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum*….., 253.

ketepatan keputusan tentang gambaran siswa dan efektivitas program.

Evaluasi berfokus pada upaya untuk menentukan tingkatan perubahan yang terjadi pada hasil belajar. Hasil belajar tersebut biasanya diukur dengan tes. Tujuan evaluasi yaitu untuk menentukan tingkat perubahan yang terjadi, baik secara statistik, maupun secara edukatif.[53]

Evaluasi merupakan pertimbangan berdasarkan atas seperangkat kriteria yang disepakati dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini tiga faktor utama, yaitu: a) pertimbangan, b) deskripsi objek penelitian, c) kriteria yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pertimbangan adalah pangkal dalam membuat suatu keputusan. Membuat keputusan berarti menentukan derajat tertentu yang berkenaan denga hasil evaluasi itu. Deskripsi objek penelitian adalah perubahan perilaku sebagai produk suatu system. Sudah barang tentu perilaku itu dijelaskan, dirinci, dan dispesifikasikan sehingga dapat diamati dan diukur. Kriteria yang dapat di pertanggungjawabkan adalah ukuran-ukuran yang akan digunakan dalam menilai suatu kurikulum.

Kriteria evaluasi harus memenuhi persyaratan di antaranya adalah: a) relevan dengan kerangka rujukan dan tujuan evaluasi

[53] Rusman, *Manajemen Kurikulum*, …… 93-94.

program kurikulum, b) diterapkan pada data deskriptif yang relevan dan menyangkut program/kurikulum. Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bawha evaluasi lebih bersifat komprehensif yang didalamnya meliputi pengukuran. Selain itu juga evaluasi pada hakikatnya merupakan suatu proses dalam membuat keputusan tentang nilai suatu objek. Keputusan evaluasi tidak hanya didasarkan pada hasil pengamatan. Baik yang didasarkan kepada hasil pengukuran maupun bukan pengukuran pada akhirnya menghasilkan keputusan nilai tentang suatu program atau kurikulum yang dievaluasi.

Evaluasi merupakan bagian dari proses kurikulum. Proses kurikulum tersebut berlangsung secara berkesinambungan dan merupakan keterpaduan dari semua dimensi pendidikan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Proses tersebut berlangsung secara bertahap dan berjenjang, yaitu:[54]

a) Proses analisis kebutuhan dan kelayakan sebagai langkah awal untuk mendesain kurikulum.
b) Proses perencanaan dan pengembangan suatu kurikulum sesuai dengan kebutuhan suatu lembaga pendidikan.
c) Proses implementasi atau pelaksanaan kurikulum yang berlangsung dalam suatu proses pembelajaran.

[54] Oemar Hamalik, *Evaluasi Kurikulum,* ……. 8-9

d) Proses evaluasi kurikulum untuk mengetahui tentang tingkat keberhasilan kurikulum.
e) Proses perbaikan kurikulum berdasarkan hasil evaluasi terhadap keterlaksanaan dan kelemahannya setelah dilakukan penilaian kurikulum.
f) Proses penelitian evaluasi kurikulum, dalam hal ini erat kaitannya dengan tahap-tahap proses lainnya, tetapi lebih mengarah pada pengembangan kurikulum sebagai cabang ilmu dan teknologi.

Evaluasi kurikulum mecakup keenam komponen tersebut. Dengan demikian, evaluasi kurikulum meliputi: komponen-komponen penjajakan kebutuhan dan studi kelayakan, perencanaan dan pengembangan, proses pembelajaran (yang didalamnya mencakup media dan pembelajaran), revisi/perbaikan kurikulum, dan *research* atau penelitian kurikulum.

Evaluasi kurikulum dapat dilakukan terhadap berbagai komponen pokok yang ada dalam kurikulum, di antara komponen yang dapat dievaluasi adalah sebagai berikut:[55]

a) Evaluasi tujuan pendidikan; merupakan evaluasi terhadap tujuan setiap mata pelajaran untuk mengetahui tingkat ketercapaiannya, baik terhadap tingkat perkembangan siswa

[55] Wina Sanjaya, *Kurikulum dan Pembelajaran: Teori dan Praktik KTSP*, 342- 348.

maupun ketercapaiannya dengan visi-misi lembaga pendidikan.

b) Evaluasi terhadap isi/materi kurikulum; merupakan evaluasi yang dilakukan terhadap seluruh pokok bahasan yang diberikan dalam setiap mata pelajaran untuk mengetahui ketersesuaiannya dengan pengalaman, karakteristik lingkungan, serta perkembangan ilmu dan teknologi.

c) Evaluasi terhadap strategi pembelajaran; merupakan evaluasi terhadap pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru terutama di dalam kelas guna mengetahui apakah strategi pembelajaran yang dilaksanakan dapat berhasil dengan baik.

d) Evaluasi terhadap program penilaian; merupakan evaluasi terhadap program penilaian yang dilaksanakan guru selama pelaksanaan pembelajaran baik secara harian, mingguan, semester, maupun penilaian akhir tahun pembelajaran.

Program evaluasi kurikulum didasarkan atas prinsip sebagai berikut:

a) Evaluasi kurikulum didasarkan atas tujuan tertentu yaitu setiap program evaluasi kurikulum terarah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara jelas dan spesifik. Dalam arti tujuan-tujuan itu pula yang mengarahkan kegiatan-kegiatan sepanjang proses evaluasi kurikulum itu dilaksanakan.

b) Evaluasi kurikulum harus bersifat obyektif yaitu pelaksanaan dan hasil evaluasi kurikulum harus bersifat objektif, berpijak pada apa adanya dan bersumber dari data yang nyata dan akurat yang diperoleh melalui instrumen yang terandalkan.

c) Evaluasi kurikulum bersifat komprehensi yaitu pelaksanaan evaluasi mencakup semua dimensi atau aspek yang terdapat dalam ruang lingkup kurikulum. Dalam hal ini semua komponen kurikulum harus mendapatkan perhatian dan pertimbangan secara seksama sebelum pengambilan keputusan.

d) Evaluasi kurikulum dilaksanakan secara kooperatif yaitu tanggung jawab dalam perencanaan, pelaksanaan, dan keberhasilan suatu program kurikulum yang merupakan tanggung jawab bersama pihak-pihak yang terlibat dalam proses pendidikan seperti guru, kepala sekolah, pemilik sekolah, orang tua, bahkan siswa itu sendiri disamping menajadi tanggung jawab utama lembaga penelitian dan pengembangan.

e) Evaluasi kurikulum harus dilaksanakan secara efisien yaitu pelaksanaan evaluasi kurikulum harus mempehatikan faktor efisiensi, khususnya dalam penggunaan waktu, biaya, tenaga, peralatan yang menjadi unsur penunjang, dan oleh

karenanya agar hasil evaluasi lebih tinggi atau paling tidak berimbang dengan material yang digunakan.

f) Evaluasi kurikulum dilaksanakan secara berkesinambungan yaitu hal ini perlu mengingat tuntutan di dalam dan luar sistem sekolah yang meminta diadakannya perbaikan kurikulum. Untuk itu, peran guru dan kepala sekolah sangat penting karena merekalah yang paling mengetahui tentang keterlaksanaan dan keberhasilan kurikulum serta permasalah yang dihadapi.[56]

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas mengenai evaluasi kurikulum maka dapat disimpulkan bahwa evaluasi kurikulum dapat menyajikan bahan informasi mengenai area-area kelemahan kurikulum sehingga dari hasil evaluasi dapat dilakukan proses perbaikan menuju yang lebih baik.

Evaluasi kurikulum sangat penting dilakukan, karena evaluasi kurikulum dapat menyajikan informasi mengenai kesesuaian, efektivitas dan efisiensi kurikulum terhadap tujuan yang ingin dicapai dan penggunaan sumber daya, yang mana informasi sangat berguna sebagai bahan pembuat keputusan. Evaluasi kerikulum juga penting untuk dilakukan guna mengukur kemampuan peserta didik, serta dalam rangka penyesuaian

[56] Oemar Hamalik, *Evaluasi Kurikulum*……, 13-14.

dengan perkembangan ilmu pengetahuan, kemajuan teknologi dan informasi, serta menyesuaikan perubahan zaman.

d. Bentuk-Bentuk Kurikulum

Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan yang berkaitan dengan tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan pada setiap jenis, jenjang, dan jalur pendidikan. Kurikulum disusun dan dirancang berdasarkan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta harapan masyarakat, pemerintah, dan *stakeholders* pendidikan. Rancangan dan pengembangan kurikulum yang ada di sekolah/madrasah merupakan inti dari bidang garapan pendidikan. Oleh karena itu, kurikulum memiliki pengaruh terhadap seluruh kegiatan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah.

Kurikulum mempunyai peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan untuk memenuhi tuntutan kehidupan dan peradaban manusia yang selalu berkembang, maka penyusunan dan perumusan kurikulum tidak dapat dilaksanakan secara sembarangan tanpa adanya landasan dalam penyusunanya. Perumusan dan penyusunan kurikulum pada setiap jenis dan jenjang pendidikan membutuhkan landasan-landasan pengembangan kurikulum yang tepat, yang didasarkan pada hasil-hasil pemikiran, pengkajian, dan penelitian yang mendalam serta melalui uji coba

dalam pengembangannya. Penyusunan kurikulum yang tidak didasarkan pada landasan yang kuat dapat berakibat fatal terhadap kegagalan pendidikan dan pembangunan bangsa untuk menjadi Negara yang lebih maju, unggul, dan berdaya saing di era globalisasi.

Berdasarkan uraian di atas, maka pada bagian ini dapat dijelaskan bentuk-bentuk kurikulum yang dapat diterapkan di lembaga pendidikan, yaitu:

1) *Subject Matter Curriculum*, yaitu kurikulum yang terdiri atas mata pelajaran yang terpisah-pisah. Materi yang akan dipelajari oleh siswa telah disusun secara logis oleh para ahli bidang studi. Keuntungan dari bentuk kurikulum ini adalah: a) mata pelajaran terdiri atas pengetahuan yang telah disusun secara logis dan sistematis, b) mata pelajaran dianggap sebagai alat yang sesuai untuk mengembangkan intelektual seseorang, c) sejalan dengan konsep-konsep yang telah ditata sesuai dengan proses pendidikan, d) sebagai pewarisan pengetahuan yang telah dikembangkan, e) penyusunannya mudah dilaksanakan. Adapun kelemahannya dapat diidentifikasi sebagai berikut: a) belum tentu sesuai dengan latar belakang kehidupan anak, sehingga anak sering menghafal tanpa pengertian, b) terlalu mementingkan perkembangan intelektual, mengabaikan perkembangan sosial, emosional, dan pendidikan watak, c) karena mata pelajaran terpisah-pisah, kurang memberikan bekal

pemecahan masalah secara integrative, d) kurang memperhatikan fungsionalnya dalam kehidupan, sehingga anak kurang terlatih menghadapi masalah kehidupan yang sebenarnya.

2) *Broad field* (*correlated curriculum*), yaitu kurikulum yang disusun dengan menggabungkan sejumlah mata pelajaran dalam satu kesatuan. Keuntungannya adalah: a) lebih menarik bagi anak, b) anak mempunyai pengertian yang luas, karena adanya keterkaitan antara mata pelajaran, c) anak mulai dapat memanfaatkan kesatuan mata pelajaran untuk meninjau berbagai persoalan hidup. Adapun kelemahannya adalah a) kurang memberikan disiplin ditinjau spesialisasi mata pelajaran, b) kurang memberikan pengetahuan yang mendalam pada masing-masing mata pelajaran, c) sering terlampau abstrak, karena hanya prinsip-prinsip dasar dan tema-tema tertentu.

3) *Integrated Curriculum*, yaitu kurikulum yang diorganisasikan dalam bentuk unit-unit tanpa harus ada mata pelajaran atau bidang studi. Pembelajaran dilaksanakan dengan *"Unit Teaching"* dan materinya menggunakan *"Unit Lesson"*. Pembelajaran disusun bersama guru dan murid, mengandung suatu masalah yang luas, menggunakan metode *"Problem Solving"* sesuai dengan minat dan perkembangan anak. Keuntungan dari bentuk kurikulum adalah a) didasarkan atas pengalaman dan minat anak, b) menggunakan beragam kegiatan

untuk memecahkan masalah, c) guru merencanakan pembelajaran bersama-sama murid, d) integrasi semua mata pelajaran, e) memberikan pengalaman langsung kepada anak, f) pelajaran sesuai dengan kehidupan anak, g) memperhatikan perbedaan individual kehidupan anak, h) mengembangkan keterampilan fungsional, i) menggunakan lingkungan sebagai sumber pembelajaran, j) banyak memberikan keterampilan sosial, k) menggunakan psikologi Gastalt dalam pembelajaran. Adapun kelemahan dari kurikulum ini adalah a) kurang mempersiapkan anak mengikuti ujian tradisional selama ini, b) memerlukan fasilitas pembelajaran yang belum dimiliki oleh sekolah, c) tidak memberikan pengetahuan yang logis dan sistematis, d) memberatkan tugas guru, e) lebih mengutamakan proses daripada materi, f) manajemen pembelajaran yang sangat sulit.

4) *Core Curriculum*, yaitu kurikulum inti yang diberikan kepada semua siswa untuk mencapai keseluruhan program kurikulum secara komprehensif. Misalnya: Agama dan PKn.[57]

e. Pendekatan Manajemen Kurikulum

Manajemen kurikulum adalah sebagai suatu sistem pengelolaan kurikulum yang kooperatif, komprehensif, sistemik, dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum. Otonomi

[57] Prim Masrokan Mutohar, *Manajemen Pendidikan* ….., 126

diberikan kepada lembaga pendidikan atau sekolah dalam mengelola kurikulum secara mandiri dengan memprioritaskan kebutuhan dan ketercapaian sasaran dalam visi dan misi lembaga pendidikan atau sekolah tidak mengabaikan kebijakan Nasional yang telah ditetapkan.[25]

Sedangkan menurut Mulyasa manajemen kurikulum merupakan suatu kegiatan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian kurikulum.[26] Pandangan Mulyasa hanya menekankan tiga aspek saja, sedangkan aspek pengorganisasian kurikulum secara eksplisit tidak dijelaskan dalam definisinya.

Depdiknas dalam Syafarudin mengartikan manajemen kurikulum sebagai "suatu proses mengarahkan agar proses pembelajaran berjalan dengan baik sebagai tolak ukur pencapaian tujuan pengajaran oleh pengajar".[27] Lebih lanjut dijelaskan bahwa aktifitas manajemen kurikulum ini merupakan kolaborasi antara ketua lembaga PKBM beserta para guru dalam melakukan kegiatan manajerial agar perencanaan berlangsung dengan baik.

Manajemen kurikulum berupaya untuk mengurus, mengatur, dan mengelola perangkat mata pelajaran yang akan diajarkan pada lembaga pendidikan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.

Keterlibatan masyarakat dalam manajemen kurikulum dimaksudkan agar dapat memahami, membantu, dan mengontrol

implementasi kurikulum, sehingga lembaga pendidikan atau sekolah selain dituntut kooperatif juga mampu mandiri dalam mengidentifikasikan kebutuhan kurikulum, mendesain kurikulum, menentukan prioritas kurikulum, melaksanakan pembelajaran, menilai kurikulum, mengendalikan serta melaporkan sumber dan hasil kurikulum, baik kepada masyarakat maupun kepada pemerintah.

Manajemen kurikulum adalah bagian dari studi kurikulum. Para ahli pendidikan pada umumnya telah mengenal bahwa kurikulum suatu cabang dari disiplin ilmu pendidikan yang mempunyai ruang lingkup sagat luas. Studi ini tidak hanya membahas tentang dasar- dasarnya, tetapi juga mempelajari kurikulum secara keseluruhan yang dilaksanakan dalam pendidikan.

f. Prinsip Manajemen Kurikulum

Dalam melaksanakan manajemen kurikulum, sedikitnya ada 5 (lima) prinsip yang harus menjadi perhatian penting, yaitu:[28]

1) Produktivitas, hasil yang akan diperoleh dalam kegiatan kurikulum merupakan aspek yang harus dipertimbangkan dalam manajemen kurikulum. Pertimbangan bagaimana agar peserta didik dapat mencapai hasil belajar sesuai dengan tujuan kurikulum harus menjadi sasaran dalam manajemen kurikulum.
2) Demokratisasi, pelaksanaan manajemen kurikulum harus berasaskan demokrasi yang menempatkan pengelola, pelaksana dan subjek didik pada posisi yang seharusnya dalam

melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab untuk mencapai tujuan kurikulum.

3) Kooperatif, untuk memperoleh hasil yang diharapkan dalam kegiatan manajemen kurikulum perlu adanya kerjasama yang positif dari berbagai pihak yang terlibat.
4) Efektivitas dan efisiensi, rangkaian kegiatan manajemen kurikulum harus mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi untuk mencapai tujuan kurikulum sehingga kegiatan manajemen kurikulum tersebut memberikan hasil yang berguna dengan biaya, tenaga, dan waktu yang relatif singkat.
5) Mengarahkan visi, misi, dan tujuan yang ditetapkan dalam kurikulum, proses manajemen kurikulum harus dapat memperkuat dan mengarahkan visi, misi, dan tujuan kurikulum.

Selain prinsip-prinsip tersebut juga perlu dipertimbangkan kebijakan pemerintah, seperti USPN No. 20 tahun 2003, kurikulum pola Nasional, pedoman penyelenggaraan program, kebijaksanaan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), kebijaksanaan penerapan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, keputusan dan peraturan pemerintah yang berhubungan dengan lembaga pendidikan atau jenjang/jenis sekolah yang bersangkutan.

Dalam proses pendidikan perlu dilaksanakan manajemen kurikulum untuk memberikan hasil kurikulum yang lebih efektif, efesien dan optimal dalam memberdayakan berbagai sumber maupun

komponen kurikulum. Sehingga tak heran bila kurikulum ini memiliki banyak fungsi, di antaranya adalah sebagai berikut:

1) Meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum, pemberdayaan sumber maupun komponen kurikulum dapat ditingkatkan melalui pengelolaan yang terencana dan efektif.
2) Meningkatkan keadilan (*equity*) dan kesempatan pada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal, kemampuan yang maksimal dapat dicapai peserta didik tidak hanya melalui kegiatan intrakurikuler, tetapi juga perlu melalui kegiatan ekstra dan kokurikuler yang dikelola secara integratis dalam mencapai tujuan kurikulum.
3) Meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar peserta didik, kurikulum yang dikelola secara efektif dapat memberikan kesempatan dan hasil yang relevan dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar.
4) Meningkatkan efektivitas kinerja guru maupun aktivitas siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran, dengan pengelolaan kurikulum yang professional, efektif dan terpadu dapat memberikan motivasi pada kinerja guru maupun aktivitas siswa dalam belajar.
5) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses belajar mengajar, proses pembelajaran selalu dipantai dalam rangka melihat

konsistensi antara desain yang telah direncanakan dengan pelaksanaan pembelajaran. Dengan demikian ketidaksesuaian antara disain dengan implementasi dapat dihindarkan. Di samping itu, guru maupun siswa selalu termotivasi untuk melaksanakan pembelajaran yang efektif dan efesien, karena adanya dukungan kondisi positif yang diciptakan dalam kegiatan pengelolaan kurikulum.

6) Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membantu mengembangkan kurikulum, kurikulum yang dikelola secara profesional akan melibatkan masyarakat khususnya dalam mengisi bahan ajar atau sumber belajar perlu disesuaikan dengan ciri khas dan kebutuhan pembangunan daerah setempat.[2]

g. Manajemen Kurikulum Dalam Perspektif Islam

Manajemen kurikulum pendidikan Islam adalah usaha sistematis yang dilakukan seseorang melalui aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum yang dilandasi dengan nilai-nilai Islam agar peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Manajemen yang baik adalah manajemen yang dilaksanakan oleh orang-orang yang benar-benar mempunyai kompetensi di bidangnya, sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya *"Dari Abu Hurairah RA berkata; Apabila suatu perkara diserahkan kepada yang bukan ahlinya maka tunggulah saat kehancurannya. (HR. Bukhari)"*

Jadi, manajemen kurikulum yaitu suatu proses usaha bersama dalam kelancaran pencapain tujuan pembelajaran dengan dititikberatkan pada usaha, meiningkatkan kualitas interaksi belajar mengajar. Perencanaan kurikulum pendidikan Islam mensyaratkan terkait muatan materi kurikulum yang memiliki jangkauan yang lebih jauh yaitu tidak hanya membekali pesrta didik dengan seperangkat kompetensi keduniawiaan (artinya siap kerja) saja dengan *skill*, kecakapan hidup dan kompetensi lainnya, tetapi juga muatan mata pelajaran yang membekali siswa untuk siap dalam menghadapi kehidupan yang lebih abadi yaitu menghadap kehadirat Allah SWT, sehingga jangkauan perencanaan kurikulumnya tidak hanya berbunyi dunia-kerja, tetapi dunia-akhirat.[58]

Dalam Islam, perencanaan merupakan salah satu aspek yang ditekankan sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat Al-Hasysr : 18 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (١٨)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

[58] Agus Zainul Fitri, *Manajamen Kurikulum Pendidikan Islam*,……, 4.

Berdasarkan ayat di atas menunjukkan bahwa perlunya memperhatikan sesuatu yang akan dilaksanakan untuk ke. Dalam konteks manajemen pendidikan dipahami sebagai suatu perintah untuk membuat perencanaan yang baik, agar pada saat pelaksanaan tidak mengalami kegagalan dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Prinsip manajemen yang mengatakan bahwa "If y*ou fail to plan, you plan to fail*".

Kegiatan pengorganisasian kurikulum pendidikan Islam tampak melalui adanya kesatuan yang utuh dan terciptanya mekanisme yang sehat, sehingga proses kegiatan dapat berjalan dengan lancar dan baik guna untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Proses pengorganisasian tersebut menekankan pentingnya kesatuan dalam segala tindakan, dalam hal ini Al-Qur'an telah menyebutkan bahwasanya betapa pentingnya tindakan kesatuan yang utuh, murni dan bulat dalam suatu organisasi (lembaga pendidikan baik formal maupun nonformal). Sebagaimana firman Allah Swt dalam surat Al-Imran : 103 sebagai berikut:

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْداءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْواناً وَكُنْتُمْ عَلى شَفا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْها كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آياتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ . ١٠٣

Artinya: Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah

akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah Swt, orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah Swt menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah Swt menerangkan ayat-ayat Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk.

Pelaksanaan kurikulum pendidikan Islam adalah tindakan yang nyata dari perencanaan yang telah dibuat secara konsisten dan kontinyu. Allah SWT tidak suka dengan orang-orang yang sudah membuat suatu rencana tetapi tidak dilakukan dengan baik. Indikator keberhasilan dalam pelaksanaan kurikulum pendidikan Islam adalah adanya wujud nyata dari apa yang direncanakan, misalnya: *output* yang dihasilkan dari organisasi (lembaga pendidikan). Sebagaimana telah diterangkan dalam Al- Qur'an surat Al-An'am : 135 sebagai berikut:

قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ (١٣٥)

Artinya:"Katakanlah wahai kaumku, berbuatlah sepenuh kemampuanmu, Sesungguhnya akupun berbuat (pula). Kelak kamu akan mengetahui, siapakah (di antara kita) yang akan memperoleh hasil yang baik di dunia ini.

Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan mendapatkan keberuntungan."

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan merupakan adanya aktivitas serta tindakan yang nyata dan mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa pelaksanaan bukan hanya sekadar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu, pelaksanaan tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh perencanaan dan evaluasi yang baik. Dengan demikian, maka implementasi kurikulum pendidikan Islam merupakan proses untuk melaksanakan ide, program atau seperangkat aktivitas pendidikan Islam dengan harapan terjadi perubahan pada pola pikir dan perilaku peserta didik menjadi lebih baik dan sesuai dengan tuntunan Allah SWT.

Dalam manajemen kurikulum pendidikan Islam evaluasi merupakan salah satu fungsi yang harus dijalankan. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Ankabut ayat 2-3 sebagai berikut:

حَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ (٢) وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ (٣)

Artinya: *Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan (saja) mengatakan: "Kami telah beriman", sedang mereka*

tidak diuji lagi. Dan Sesungguhnya Kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, Maka Sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang.

2. Mutu Pendidikan

a. Pengertian Mutu Pendidikan

Mutu pendidikan merupakan salah satu masalah utama yang termasuk permasalahan pendidikan Nasional di Indonesia. Isu tentang rendahnya mutu pendidikan sekolah sudah lama didengar, baik dari survey Bebby, hasil telaah Djalil, maupun hasil rangkuman analisis Suryadi dan Tilaar menunjukkan bahwa mutu pendidikan di sekolah-sekolah di Indonesia masih belum mencapai kualifikasi yang baik. Apabila ditelaah secara seksama banyak faktor yang menjadi penyebab kurangnya mutu pendidikan di sekolah. Kurangnya kualitas guru, kurangnya motivasi, kurangnya sarana prasarana sampai pada kurangnya kualitas input. Selain faktor-faktor tersebut, kepemimpinan kepala sekolah merupakan salah satu faktor penentu yang berpengaruh terhadap kualitas sekolah dan keefektifan sekolah.[59]

Menurut Juran (1993), mutu produk ialah kecocokan penggunaan produk (*fitness for use*) untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan. Kecocokan pengguna produk tersebut didasarkan atas lima ciri utama yaitu 1) teknologi; yaitu kekuatan; 2)

[59] Prim Masrokan Mutohar, *Manajemen Pendidikan*……, 1

psikologis, yaitu rasa atau status; 3) waktu, yaitu kehandalan; 4) kontraktual, yaitu ada jaminan; 5) etika, yaitu sopan santun.[60]

Juran telah mengembangkan sebuah pendekatan yang disebut Manajemen Mutu Strategis (SQM) untuk membantu manajer dalam merencanakan. SQM adalah sebuah proses tiga bagian yang didasarkan pada staf pada tingkatan berbeda yang memberikan kontribusi terhadap peningkatan mutu, diantaranya:

1) Manajemen senior memiliki pandangan strategis tentang organisasi;
2) Manajer menengah memiliki pandangan operasional tentang mutu;
3) Karyawan memiliki tanggung jawab terhadap kontrol mutu;

Dalam pandangan Juran terkait produk yang memiliki mutu tinggi akan memberikan beberapa manfat, yaitu: a) meningkatkan kepuasan pelanggan; b) membuat produk mudah laku dijual; c) memenangkan persaingan; d) meningkatkan pangsa pasar; e) memperoleh pemasukan dari penjual; f) menjamin harga premium; g) dampak yang utama adalah dampak terhadap penjualan; h) biasanya, mutu yang lebih tinggi membutuhkan biaya yang lebih banyak.[61]

Menurut Kementrian Pendidikan Nasonal yang dikutip oleh Mulyasa, pengertian mutu mencakup input, proses, dan output pendidikan. Input pendidikan merupakan sesuatu yang harus tersedia

[60] Hadis, Abdul, B, Nurhayati, *Manajemen Mutu Pendidikan*, (Bandung: AlfaBeta, 2010), 84-85.

[61] Djoko Wijono, *Manajemen Mutu Pelayanan Kesehatan*, …… 7

karena dibutuhkan demi berlangsungnya suatu peroses. Sementara proses pendidikan merupakan perubahan sesuatu menjadi sesuatu yang lain. Selanjutnya, output pendidikan merupakan kinerja sekolah, yaitu prestasi sekolah yang dihasilkan dari proses dan prilaku sekolah. Oleh sebab itu, mutu dalam dunia pendidikan dapat dinyatakan lebih mengutamankan pada keberhasilan siswa. Dengan kata lain, program perbaikan sekolah dilakukan lebih secara kreatif dan konstruktif.[62]

Adapun definisi pendidikan berdasarkan Undang-Undang SISDIKNAS No. 2 Tahun 2003 adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasan belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memliki kekuatan spiritual keagamaan, pengedalian, diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.[63]

Mutu merupakan sebuah proses terstruktur untuk memperbaiki keluaran yang dihasilkan. Dalam peningkatan mutu pendidikan dapat dipengaruhi oleh faktor input pendidikan dan faktor proses manajemen pendidikan. Input pendidikan adalah segala sesuatu yang harus tersedia karena dibutuhkan untuk berlangsungnya proses. Input pendidikan terdiri dari seluruh sumber daya sekolah yang ada.

---

[62] Zahroh, Aminatul, *Total Quality Management; Teori & Praktek Manajemen Dalam Mendongkrak Mutu Pendidikan*, (Yogyakarta; AR-RUZZ MEDIA, 2014), 28.

[63] Tim Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Sisdiknas 2003,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 2

Komponen dan sumber daya sekolah terdiri dari orang (*man*), dana (*money*), sarana dan prasarana (*material*) serta peraturan (*policy*).[64]

Dari pengertian di atas maka input pendidikan yang merupakan faktor mempengaruhi mutu pendidikan dapat berupa: a) sumberdaya manusia sebagai pengelola sekolah yang terdiri dari: kepala sekolah, guru, dan tenaga administrasi, b) sarana dan prasarana, c) kesiswaan, d) keuangan, e) kurikulum, f) keorganisasian, g) lingkungan fisik, h) perkembangan ilmu pengetahuan/teknologi, i) peraturan, j) partisipasi atau peran serta masyarakat, dan k) kebijakan pendidikan.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan berpengaruh penting dalam kehidupan masyarakat. Dengan adanya pendidikan maka seseorang dapat dituntun, di ajar dengan sungguh-sungguh, baik itu melalui pendidikan yang sifatnya formal maupun nonformal.

Pengupayaan peningkatan mutu pendidikan digunakan teori tentang peningkatan mutu milik Juran yang dikenal Trilogi Juran. Langkah-langkah proses peningkatan mutu dalam Trilogi Juran meliputi perencanaan (*planning*), pengendalian (*controlling*), dan peningkatan (*improvement*).

Pertama perencanaan mutu, Perencanaan ini melibatkan serangkaian langkah-langkah universal, yaitu (1) menentukan siapa

[64] Soebagio Admodiwirjo, *Manajemen Pendidikan Indonesia*, (Jakarta: Ardadizya Jaya, 2002), 22.

pelanggannya, (2) menentukan kebutuhan pelanggan, (3) mengembangkan keistemawaan produk yang menanggapi kebutuhan pelanggan, (4) mengembangkan proses yang dapat menghasilkan keistemewaan produk itu, dan (5) mentransfer rencana yang dihasilakan ke dalam tenaga operasi.[65]

Kedua, pengendalian mutu. Proses ini terdii dari langkah-langkah sebagai berikut: (1) mengevaluasi kinerja mutu nyata, (2) membandingkan kinerja nyata dengan tujuan mutu, dan (3) bertindak berdasarkan perbedaan.[89] *Ketiga*, proses ini adalah cara-cara menaikkan kinerja mutu ke tingkat yang tak pernah terjadi sebelumnya (terobosan), dengan langkah-langkah: (1) membangun prasarana yang diperlukan untuk menjamin peningkatan mutu tahunan; (2) mengendali kebutuhan khusus untuk peningkatan-proyek peningkatan; (3) untuk setiap proyek, bentuklah satu tim proyek dengan tanggung jawab yang jelas untuk membawa proyek meraih keberhasilan; (4) memberikan sumber daya, motivasi, dan pelatihan yang dibutuhkan oleh tim untuk mendiagnosis penyebabnya, merangsang penetapan cara penyembuhannya, menetapkan kendali untuk mempertahankan perolehan.[66]

Berdasarkan hasil pengkajian yang dilaksanakan oleh Suryadi dan Tilaar menunjukkan bahwa kepemimpinan kepala sekolah merupakan faktor utama yang menentukan prestasi sekolah. Oleh

[65] Nurul Hidayah, *Kepemimpinan Visioner Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu*……., 135.

[66] *Ibid*…., 135-136.

karena itu, peningkatan mutu pendidikan harus diawali dari kemampuan kepala sekolah dalam mengelola lembaga pendidikan dan dalam menjalankan peran dan tugasnya sebagai pemimpin di sekolah/madrasah. Kepala sekolah/madrasah sebagai pemimpin pendidikan harus senantiasa dapat menjalankan tugas-tugas kepemimpinannya yang difokuskan dalam memperbaiki proses pendidikan dan pembelajaran yang dapat meningkatkan mutu pendidikan di sekolah/madrasah.[67]

b. Langkah-langkah Meningkatkan Mutu Pendidikan

Proses menuju sekolah atau madrasah bermutu, diperlukan berbagai langkah dan prosedur yang sistematis. Beberapa langkah strategis yang dilakukan sekolah atau madrasah untuk meningkatkan mutu pendidikan adalah:[68]

1) Menganalisis lingkungan strategis sebagai dasar untuk mendefinisikan indikator sekolah atau madrasah bermutu. Kepala sekolah atau madrasah bersama guru dan *stakeholder* menganalisis lingkungan yang akan dijadikan dasar dalam menentukan progam unggulan yang akan dilakukan oleh masyarakat.
2) Mengevaluasi kapasitas daya dukung internal masyarakat. daya dukung sarana dan prasarana baik gedung dan bangunan, ruang

[67] Prim Masrokan Mutohar, *Manajemen Pendidikan* ……, 2

[68] Yusuf Umar, *Manajemen Pendidikan Madrasah Bermutu*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2016), 102-103.

kelas dan berbagai fasilitasnya, fasilitas pendukung lainnya seperti perpustakaan dan laboratorium.

3) Menetapkan visi, misi, tujuan, dan strategi untuk mewujudkan mutu lulusan. Kepala sekolah atau madrasah merumuskan visi, misi, dan strategi yang sesuai dengan tujuan meningkatkan sekolah atau madrasah bermutu.
4) Menyusun rencana jangka menengah dan rencana kegiatan tahunan sehingga sekolah atau madrasah menetapkan strategi yang paling tepat untuk mencapai tujuan, menetapkan kegiatan, jadwal, dan struktur yang telah diselaraskan dengan kebutuhan pengembangan program.
5) Meningkatkan daya dukung sumber daya, untuk menunjang pencapaian tujuan yang telah ditetapkan perlu dilakukan peningkatan daya dukung sumber daya, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya. Peningkatan sumber daya manusia dilakukan melalui kegiatan pelatihan bagi guru untuk meningkatkan wawasan pengetahuan dan kemampuan kompetensinya. Sementara peningkatan sumber daya yang lainnya sperti penambahan buku perpustakaan, pemenuhan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran.
6) Mengimplementasikan rencana, pelaksanaan peningkatan sekolah atau madrasah bermutu dilakukan dengan berpedoman kepada perencanaan yang telah disusun.

7) Memonitor dan mengevaluasi proses dan hasil, pelaksanaan peningkatan sekolah atau madrasah bermutu harus di *monitoring* dan di evaluasi. Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui kelemahan dan kekurangan pelaksanaan kegiatan.
8) Melaksanakan perbaikan pada siklus kegiatan berikutnya. Hasil monitoring dan evaluasi dijadikan bahan perbaikan bagi kegiatan tahun berikutnya. Kelemahan dan kekurangan tahun sebelumnya diperbaiki pada tahun berikutnya.

Dalam peningkatan mutu pendidikan melalui manajemen berbasis sekolah (MPMBS) Depdiknas, dinyatakan bahwa:[69]

1) Input, pendidikan adalah segala sesuatu (sumber daya) yang harus tersedia karena dibutuhkan untuk berlangsungnya proses. Sumber daya dimaksud dapat berupa sumberdaya manusia: kepala sekolah, guru, karyawan, siswa, penjaga sekolah, dan lainnya, juga perangkat lainnya seperti struktur organisasi sekolah, peraturan sekolah, deskripsi tugas, rencana- program, dan lainnya.
2) Proses, pendidikan dapat berupa proses pengambilan keputusan, proses pengelolaan kelembagaan, proses pengelolaan program, proses belajar mengajar, dan proses monitoring dan evaluasi. Proses dikatakan bermutu tinggi apabila harmonis, sehingga

[69] Suwandi, "*Studi Kebijakan Pengelolaan Guru Pasca Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dalam Rangka Peningkatan Mutu Pendidikan"* (Tenaga Fungsional Peneliti Balitbang Depdiknas Jakarta) Jurnal Ekonomi & Pendidikan, Volume 4 No. 2, November 2007, 65-66.

mampu menciptakan situasi belajar yang kondusif, menyenangkan, mendorong motivasi dan minat belajar, dan memberdayakan peserta didik.

3) Output, pendidikan merupakan kinerja sekolah, yang dapat diukur dari kualitas, efektivitas, produktivitas, efisiensi, inovasi, kualitas kehidupan kerja, dan moral kerja. Sekolah dikatakan berkualitas tinggi jika pencapaian prestasi akademik yang tinggi. Prestasi akademik berupa ulangan umum, EBTA, EBTANAS, karya ilmiah, lomba akademik, dan prestasi nonakademik, seperti kesopanan, keimanan dan ketaqwaan (IMTAQ), kejujuran, olahraga, kesenian keterampilan, dan prestasi pada kegiatan ekstrakurikuler lainnya.

Dalam MBS sekolah dapat merencanakan, menetapkan, dan melaksanakan sendiri kebijakan, program, dan kegiatan sekolah, dalam memajukan institusi sekolah dan meningkatkan mutu pendidikannya. Oleh karena itu, Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) ini kemudian dikenal dengan nama Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS). Sudah barang tentu sekolah tidak dapat melakukannya sendiri. Sekolah harus dapat menjalin dan bekerja sama dengan semua *stakeholder* pendidikan.

c. Indikator Standar Mutu Pendidikan

Muhammad Fadhli menyatakan bahwa untuk mengukur pendidikan yang bermutu maka diperlukan criteria atau indikator.[70] Berikut adalah beberapa indikator mutu pada lembaga pendidikan yaitu sebagai berikut:

1) *High moral value*
2) *Excellent examination results*
3) *The support of parents, business and the local community*
4) *Plentiful resources*
5) *The application of the latest technology*
6) *Strong and purposeful leadership*
7) *The care and concern for pupils and students*
8) *A well-balanced and challenging curriculum.*

Pandangan ini menjelaskan bahwa sekolah yang bermutu dan baik harus memiliki:

1) Nilai-nilai moral atau karakter yang tinggi;
2) Hasil ujian yang sangat baik;
3) Dukungan orang tua, dunia usaha dan masyarakat setempat;
4) Sumber daya berlimpah;
5) Implementasi teknologi terbaru;
6) Kepemimpinan yang kuat dan memiliki tujuan (visi);
7) Keperdulian dan perhatian bagi siswa;

[70] Muhammad Fadhli, *Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan*, (TADBIR: Jurnal Studi Manajemen Pendidikan, 2017) Vol. 1, No 02, 216.

8) Kurikulum yang seimbang dan relevan.

Indikator standar mutu pendidikan secara Nasional standar mutu pendidikan merujuk kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) meliputi:

1) Standar kompetensi lulusan kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan.
2) Standar isi adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
3) Standar proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
4) Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria mengenai pendidikan penjabatan dan kelayakan maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan.
5) Standar sarana dan prasarana adalah kriteria mengenai ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustkaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang

proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

6) Standar pengelolaan adalah kriteria mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau Nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.
7) Standar pembiayaan adalah kriteria mengenai komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun.
8) Standar penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.

Fungsi dan tujuan Standar Nasional Pendidikan (SNP) meliputi:

1) Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan Nasional yang bermutu.
2) Standar Nasional Pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan Nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat.
3) Standar Nasional Pendidikan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, Nasional, dan global.

Kedelapan standar di atas membentuk rangkaian input, proses, dan output. Standar Kompetensi Lulusan merupakan output dalam rangkaian tersebut dan akan terpenuhi apabila input terpenuhi sepenuhnya dan proses berjalan dengan baik. Standar yang menjadi input dan proses dideskripsi-kan dalam bentuk hubungan sebab-akibat dengan output. Standar dijabarkan dalam bentuk indikator mutu untuk mempermudah kegiatan pemetaan mutu dalam penjaminan mutu pendidikan.

Gambar 1.2 Standar Nasional Pendidikan

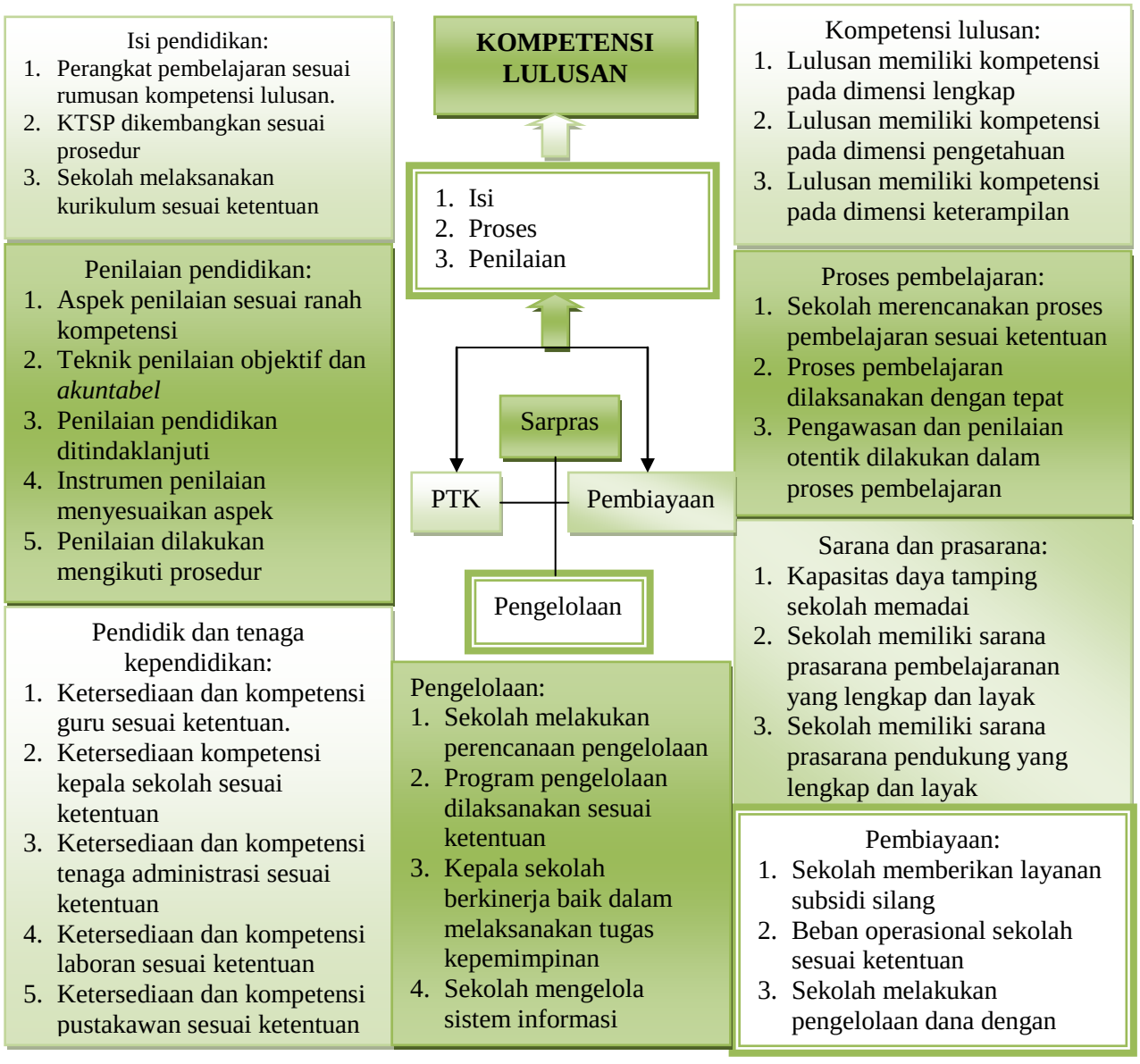

Dari pemaparan diatas terkait Standar Nasional Pendidikan (SNP) meliputi: standar kompetensi, standar isi, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, standar penilaian pendidikan. Dari 8 standar Nasional Pendidikan (SNP) pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) masih belum memenuhi 8 standar SNP yaitu terkait sarana dan prasarana di PKBM yang masih belum sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Untuk meningkatkan mutu pendidikan perlu dilihat dari banyak sisi. Telah banyak pakar pendidikan mengemukakan pendapatnya tentang faktor penyebab dan solusi mengatasi kemerosotan mutu pendidikan di lndonesia.

Muhammad Fadhli menyatakan bahwa dalam persfektif makro banyak faktor yang mempengaruhi mutu pendidikan, diantaranya faktor kurikulum, kebijakan pendidikan, fasilitas pendidikan, aplikasi teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia pendidikan, khususnya dalam kegiatan proses belajar mengajar, aplikasi metode, strategi dan pendekatan pendidikan yang mutakhir dan modern, metode evaluasi pendidikan yang tepat, biaya pendidikan yang memadai, manajemen pendidikan yang dilaksanakan secara profesional, sumberdaya manusia para pelaku pendidikan yang terlatih, berpengetahuan, berpengalaman dan professional.

Acuan dasar di atas merupakan standar Nasional pendidikan yang dimaksudkan untuk memacu pengelola, penyelenggara, dan satuan pendidikan agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam memberikan layanan pendidikan yang bermutu bagi masyarakat. Selain itu, standar Nasional pendidikan juga dimaksudkan sebagai perangkat untuk mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan sistem pendidikan Nasional.

Standar Nasional pendidikan memuat kriteria minimal tentang komponen pendidikan yang memungkinkan pada setiap jenjang dan jalur pendidikan untuk mengembangkan pendidikan secara optimal sesuai dengan karakteristik dan kekhasan programnya. Standar Nasional pendidikan tinggi diatur seminimal mungkin untuk memberikan keleluasaan kepada masing-masing satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi dalam mengembangkan mutu layanan pendidikannya sesuai dengan program studi dan keahlian dalam kerangka otonomi perguruan tinggi.

Demikian juga untuk standar Nasional pendidikan untuk jalur pendidikan nonformal hanya mengatur hal-hal pokok dengan maksud memberikan keleluasaan kepada masing-masing satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal yang memiliki karakteristik tidak terstruktur untuk mengembangkan programnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sedangkan penyelenggaraan pendidikan

informal sepenuhnya menjadi kewenangan keluarga dan masyarakat serta didorong dan diberikan keleluasaan dalam mengembangkan program pendidikannya sesuai dengan kebutuhan keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, standar Nasional pendidikan pada jalur pendidikan informal hanya mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pengakuan kompetensi peserta didik saja.

Dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, lembaga yang memberikan pelayanan penjaminan kualitas atau mutu pendidik yaitu BAN (Badan Akreditasi Nasional), menurut Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal (BAN-PNF) yang selanjutnya disebut BAN-PNF adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan atau satuan pendidikan jalur Pendidikan Nonformal dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan. Menurut BAN-PNF untuk menilai kelayakan tersebut disusun instrumen akreditasi yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005, yang mencakup 8 standar, yaitu 1) Standar Kompetensi Lulusan, 2) Standar Isi, 3) Standar Proses, 4) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, 5) Standar Sarana dan Prasarana, 6) Standar Pengelolaan, 7) Standar Pembiayaan dan 8) Standar Penilaian Pendidikan.

3. Pendidikan berbasis masyarakat

a. Pengertian Pendidikan berbasis masyarakat

Pendidikan berbasis masyarakat merupakan model pendidikan yang mana segala hal yang terkait di dalamnya lebih banyak melibatkan peran masyarakat daripada keterlibatan atau campur tangan negara (pemerintah). Masyarakat mempunyai wewenang dan tanggung jawab besar dalam penyelenggaraannya. Model pendidikan berbasis masyarakat merupakan tawaran terhadap *mainstream* pendidikan yang berbasis negara. Praktek pendidikan berbasis masyarakat telah lama ada sejak kemerdekaan Indonesia bahkan sebelum kemerdekaan, walaupun secara konseptual model pendidikan berbasis masyarakat belum diformulasikan secara baku saat itu.

Pendidikan berbasis masyarakat pada dasarnya dikembangkan dan dilaksanakan dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. Melalui lembaga-lembaga pendidikan berbasis masyarakat, masyarakat berupaya untuk memperbaiki kehidupannya secara terus-menerus melalui pemberdayaan dengan sarana pendidikan dan pelatihan. Dari sini kemudian berkembang model-model atau bentuk pendidikan berbasis masyarakat. Beberapa contoh dari lembaga pendidikan berbasis masyarakat adalah TKA/TPA, lembaga kursus yang dikelola masyarakat, pesantren, dan sebagainya.

Dalam pendidikan berbasis masyarakat, masyarakatlah yang menjadi tuan atau pemilik di rumahnya sendiri. Pihak lain dalam hal ini pemerintah hanya bisa menjadi mitra atau rekan yang berfungsi untuk memfasilitasi, mendanai, atau mendampingi segala kegiatan yang ada kaitannya dengan pendidikan berbasis masyarakat, tanpa ada unsur memaksakan kepentingan.

Pendidikan berbasis masyarakat merupakan mekanisme yang memberikan peluang bagi setiap orang dalam masyarakat untuk memperkaya ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pembelajaran seumur hidup.[71] Pendidikan berbasis masyarakat merupakan wujud dari demokratisasi pendidikan melalui perluasan pelayanan pendidikan untuk kepentingan masyarakat. Masyarakat mempunyai kesempatan untuk mengembangkan dan memberdayakan dirinya sendiri melalui pendidikan yang dikembangkan oleh masyarakat. pada aspek tertentu.

Pendidikan berbasis masyarakat hanya dapat eksis dan berjalan dengan baik manakala suasana kehidupan yang demokratis telah tumbuh dan berkembang dengan baik serta masyarakat mampu dan memiliki kesadaran pentingnya pemberdayaan. Pendidikan berbasis masyarakat dapat mengakomodasi berbagai teori-teori pembelajaran. Teori kecerdasan majemuk (*multiple intteligence*), belajar sosial

[71] Zubaedi, *Pendidikan Berbasis Masyarakat Upaya Menawarkan Solusi*….., 131.

(*social learning*), dan sebagainya, dapat diterapkan dalam pendidikan berbasis masyarakat.

b. Tujuan pendidikan berbasis masyarakat

Tujuan pendidikan berbasis masyarakat biasanya mengarah pada isu-isu masyarakat seperti pelatihan karir, perhatian terhadap lingkungan, pendidikan dasar, pendidikan keagamaan, penangan masalah kesehatan, dan sebagainya.[72] Tujuan pendidikan berbasis masyarakat hakikatnya adalah pemberdayaan masyarakat ke arah yang lebih baik demi terwujudnya masyarakat yang unggul dalam segala bidang. Melalui pendidkan berbasis masyarakat, masyarakat diberdayakan segala potensi dan kemampuan yang dimilikinya. Pemberdayaan dan pendidikan ini berlangsung terus-menerus dan seumur hidup *(long life education)*.

Demikian pula pendidikan berbasis masyarakat sebagaimana yang tertuang pada pasal 55 ayat 1-4:

"Ayat (1) masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan non formal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial dan budaya untuk kepentingan masyarakat. Ayat (2) penyelenggaraan pendidikan berbasis mengembangkan dan melaksanakan kurikulum dan evaluasi pendidikan, serta manajemen dan pendanaannya sesuai dengan standard Nasional pendidikan. Ayat (3) Dana penyelenggaraan

[72] *Ibid*., 132-133.

pendidikan berbasis masyarakat dapat bersumber dari penyelenggaraan, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah dan sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku; ayat (4) lembaga pendidikan berbasis masyarakat dapat memperoleh bantuan tekhnis, subsidi dana dan sumber daya lain secara adil dan merata dari pemerintah atau pemerintah daerah."

Masyarakat melalui pendidikan berbasis masyarakat, akan mampu mengembangkan potensi dan kemampuannya ke arah perubahan. Pendidikan berbasis masyarakat menjadi model dalam pemberdayaan masyarakat yang mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

4. Program Pendidikan Kesetaraan Paket C

Program Pendidikan Kesetaraan Paket C adalah layanan pendidikan melalui jalur pendidikan nonformal yang ditujukan bagi masyarakat yang karena berbagai faktor tidak dapat menyelesaikan pendidikannya atau putus sekolah ditingkat SMA/MA, yang diselenggarakan oleh lembaga/organisasi atau satuan pendidikan nonformal sehingga pada gilirannya lulusannya diharapkan memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dinyatakan dan diakui setara dengan lulusan SMA/MA (Buku Petunjuk Teknis Program Pendidikan Kesetaraan Paket C dan Prosedur Pengajuan Bantuan Tahun 2016:5)

Penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan paket C dimaksudkan untuk memberikan layanan pendidikan kepada warga negara Indonesia yang karena berbagai faktor dan sebab tidak dapat memperoleh layanan pendidikan setingkat SMA/MA pada jalur pendidikan formal, sehingga pada akhir pembelajaran program pendidikan kesetaraan Paket C diharapkan peserta didik memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diakui setara dengan SMA/MA. Penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan paket C (Buku Petunjuk Teknis Program Pendidikan Kesetaraan Paket C dan Prosedur Pengajuan Bantuan Tahun 2016:7) bertujuan untuk:

a. Menyediakan layanan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal untuk menjaring anak-anak yang putus sekolah di tingkat SMA/ MA untuk mensukseskan rintisan wajib belajar pendidikan menengah.
b. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta didik sehingga memiliki kemampuan yang setara dengan SMA/MA.
c. Membekali dasar-dasar kecakapan hidup yang bermanfaat untuk bekerja mencari nafkah atau berusaha mandiri.
d. Membekali pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta didik yang memungkinkan lulusan program dapat meningkatkan pendidikannya ke jenjang satuan pendidikan yang lebih tinggi, atau meningkatkan kariernya dalam pekerjaannya.

Struktur kurikulum pendidikan kesetaraan program kejar paket merupakan pola susunan mata pelajaran dan beban belajar yang harus

ditempuh oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran, meliputi mata pelajaran, dan bobot satuan kredit kompetensi (SKK). Penyusunan kurikulum pendidikan kesetaraan mengacu pada kompetensi inti dan kompetensi dasar kurikulum pendidikan dasar dan menengah (Permendikbud No. 24 tahun 2016) Kompetensi inti dan kompetensi dasar tersebut dilakukan kontekstualisasi dan fungsionalisasi tanpa mengurangi kualitas dan standar kompetensi yang ada. Khusus kurikulum mata pelajaran agama dan budi pekerti sepenuhnya menggunakan kurikulum pendidikan dasar dan menegah yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Muatan belajar pembelajaran kejar paket dinyatakan dalam SKK (satuan kredit kompetensi) yang menunjukkan bobot kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik dalam mengikuti program pembelajaran, baik melalui pembelajaran tatap muka, tutorial, dan atau belajar mandiri.

SKK adalah penghargaan terhadap pencapaian kompetensi sebagai hasil belajar peserta didik dalam menguasai suatu mata pelajaran. SKK diperhitungkan untuk setiap mata pelajaran yang terdapat dalam struktur kurikulum. Satu SKK dihitung berdasarkan pertimbangan muatan SK dan KD tiap mata pelajaran. SKK dapat digunakan untuk alih kredit kompetensi yang diperoleh dari jalur pendidikan informal, formal, kursus, keahlian dan kegiatan mandiri. Satu SKK adalah satu satuan kompetensi yang dicapai melalui pembelajaran 1 jam pelajaran tatap muka atau 2 jam pelajaran tutorial atau 3 jam pelajaran mandiri, atau kombinasi secara

proporsional dari ketiganya. Satu jam yang dimaksud adalah satu jam pelajaran yaitu sama dengan 35 menit untuk Paket A, 40 menit untuk Paket B, dan 45 menit untuk Paket C.

Adapun dalam penerapan Kurikulum 2013 pada pendidikan kesetaraan wajib segera diimplementasikan karena perangkat kurikulum sudah siap, minimal untuk setara kelas awal yaitu Paket A setara kelas IV SD, Paket B setara kelas VII SMP, dan Paket C setara kelas X SMA. Pemberlakuan kurikulum dilakukan bertahap sejak rombongan belajar, tidak serentak untuk semua rombongan belajar. Sehingga dalam satu tahun pelajaran ada rombongan belajar yang melaksanakan kurikulum 2013 dan rombongan belajar yang melaksanakan kurikulum lama. Misalnya pada tahun pelajaran 2018/2019 Paket C Tingkatan 5 setara kelas X menggunakan kurikulum 2013, setara kelas XI dan setara XII masih menggunakan KTSP.

Berbeda dengan pendidikan formal yang sudah sejak awal menerapkan kurikulum 2013, pendidikan kesetaraan belum menerapkan kurikulum 2013 sampai saat ini. Jika hal ini dibiarkan maka pendidikan kesetaraan akan tertinggal dengan pendidikan formal yang menjadi acuan yang disetarakan. Rujukan yang dapat dijadikan dasar implementasi kurikulum 2013 pada pendidikan kesetaraan adalah Permendikbud Nomor 160 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013. Pasal 4 menyatakan “Satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dapat melaksanakan Kurikulum Tahun 2006 paling

lama sampai dengan tahun pelajaran 2019/2020.” Pengertian satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah pada Permendikbud di atas mencakup juga pendidikan kesetaraan. Hal ini dapat dicermati pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan pasal 114 ayat (2) yang berbunyi “Pendidikan kesetaraan berfungsi sebagai pelayanan pendidikan nonformal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.” Ketentuan tersebut menegaskan bahwa satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah sebagaimana diatur dalam Permendikbud nomor 160 Tahun 2014 juga mencakup pendidikan kesetaraan, yaitu Paket A dan Paket B sebagai satuan pendidikan dasar pada jalur pendidikan nonformal serta Paket C pendidikan menengah pada jalur pendidikan nonformal.

Dengan demikian, kurikulum lama berdasarkan Permendiknas Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi Program Paket A, Paket B dan Paket C berlaku paling lama sampai dengan tahun pelajaran 2019/2020. Karena itu mulai tahun 2017 Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan bekerja sama dengan Pusat Kurikulum dan Perbukuan menyusun kurikulum 2013 untuk pendidikan kesetaraan. Disamping dokumen kurikulum Paket A, Paket B dan Paket C, telah berhasil pula disusun modul untuk setiap mata pelajaran pada Paket A setara kelas 4, Paket B setara kelas 7 dan Paket C setara kelas 10. Kebijakan tersebut agar pendidikan kesetaraan segera dapat melaksanakan kurikulum 2013.

Pelaksanaan kurikulum 2013 pada pendidikan kesetaraan dilaksanakan secara bertahap mulai pada kelas awal, sehingga dalam waktu tiga tahun ke depan semua jenjang rombongan belajar sudah menerapkan kurikuum 2013. Perangkat kurikulum dan modul sudah tersedia untuk kelas awal. Pada tahun 2018 ini keseluruhan modul direncanakan selesai untuk Paket A setara kelas 5 dan kelas 6, Paket B setara kelas 8 dan kelas 9, serta Paket C setara kelas 11 dan kelas 12.

Pembelajaran pendidikan kesetaraan kurikulum 2013 dilaksanakan berbasis modul. Modul sebagai *delivery system* dapat dilakukan dengan cara belajar mandiri, karena modul disusun agar peserta didik dapat belajar mandiri. Namun demikian belajar mandiri tidak dilakukan secara penuh karena pembelajaran modul tetap memerlukan kegiatan tatap muka dan atau kegiatan tutorial. Artinya belajar mandiri menggunakan modul tidak bisa dilakukan 100% mandiri. Kemudian mengaku belajar mandiri dengan modul dan langsung datang pada ujian pendidikan kesetaraan atau ujian Nasional.

Modul pendidikan kesetaraan sudah disusun oleh penulis yang ditunjuk Direktorat Pembinaan PendidiKan Keaksaraan dan Kesetaraan dengan penyelia dari Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kemdikbud. Pada tahun pelajaran 2018/2019 sudah tersedia modul untuk Paket A setara kelas IV, Paket B setara kelas VII, dan Paket C setara kelas X. Artinya pada tahun ajaran ini satuan pendidikan sudah bisa mengimplementasikan K13 karena modul sudah tersedia.

Untuk setiap mata pelajaran pada satu tahun tersedia sejumlah 5 (lima) modul, ada beberapa mata pelajaran sejumlah 6 (enam) modul. Kelima (keenam) modul tersebut didistribusikan pada dua semester, misalnya semester ganjil tiga modul dan semester genap dua modul. Adapun penilaian hasil belajar pada pendidikan kesetaraan K13 berbasis modul dilakukan dengan melakukan ujian modul, artinya dalam satu tahun akan ada lima atau enam nilai ujian modul. Ujian modul sebelumnya merupakan persyaratan untuk masuk ke modul berikutnya, jika hasil ujian modul memenuhi syarat ketuntasan maka diperbolehkan melanjutkan ke modul berikutnya.

Penilaian hasil belajar menggunakan ujian modul, tidak perlu melakukan ujian semester. Untuk menuangkan dalam laporan hasil belajar (buku rapor), maka nilai semester ganjil adalah hasil rerata tiga ujian modul dan nilai semester genap adalah hasil rerata nilai ujian dua modul. Nilai setiap ujian modul juga akan dicantumkan dalam rapor.

Pembelajaran pendidikan kesetaraan dengan menggunakan modul dapat dilakukan secara konvensional maupun dalam jaringan (daring) atau *online*. Belajar mandiri diawali dengan kontrak belajar dan ujian modul. Secara konvensional kontrak belajar dan ujian modul peserta didik datang secara fisik ke satuan pendidikan. Secara daring peserta didik pada kontrak belajar dan ujian modul dilakukan melalui media internet. Di antara kontrak belajar dan ujian modul dapat dilakukan kegiatan pembelajaran tatap muka dan atau tutorial. Pembelajaran tatap muka

dilakukan untuk menyampaikan materi, sedangkan pembelajaran tutorial dilakukan untuk membahas materi yang sulit atau latihan soal. Jumlah atau frekuensi pembelajaran tatap muka dan tutorial disesuaikan dengan kebutuhan dan kesulitan yang dihadapi peserta didik, artinya belajar mandiri menggunakan modul tidaklah mungkin seratus persen mandiri atau sama sekali tidak ada pertemuan di satuan pendidikan baik konvensional maupun daring. Kontrak belajar dan ujian modul dilakukan dalam bentuk pertemuan. Belum lagi jika dilakukan kegiatan belajar tatap muka dan atau tutorial di antara kontrak belajar dan ujian modul.

B. Penelitian Tedahulu

1. I Nyoman Mursa Winata dalam tesis yang berjudul *"Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Program Paket C (Setara SMA) Di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Widya Sentana Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung Tahun Pelajaran 2011/2012"*. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah 1) efektifitas komponen konteks dalam penyelenggaraan Pendidikan kesetaraan program paket C setara SMA di PKBM, 2) efektifitas komponen input dalam penyelenggaraan pendidikan kesetaraan program paket C setara SMA di PKBM, 3) efektifitas komponen proses dalam penyelenggaraan pendidikan kesetaraan program paket C setara SMA di PKBM, 4) komponen produk dalam penyelenggaraan pendidikan kesetaraan program paket C setara SMA di PKBM, 5) kendala-kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan pendidikan kesetaraan program

paket C setara SMA di PKBM. Hasil penelitian ini bahwa efektifitas penyelenggaraan pendidikan kesetaraan program paket C (setara SMA) di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Widya Sentana, Bandung tahun pelajaran 2011/2012 tergolong efektif dilihat dari variabel konteks, input, proses dan produk dengan hasil (+ + - +). Adapun penelitian ini membahas terkait evaluasi penyelenggaraan pada PKBM, sedangkan penelitian yang akan penulis bahas yaitu tentang manajemen kurikulum dalam meningkatkan mutu pendidikan di PKBM khususnya pada program Paket C.

2. Deny Firmansyah Sutisna et al. dengan jurnal yang berjudul *"Peranan PKBM Dalam Menumbuhkan Minat Dalam Pendidikan di Indonesia"*. Jurnal Mahasiswa Universitas Padjajaran Volume 1, No 1, 2012. Hasil dari penelitian ini adalah mengenai peranan pendidikan nonformal yaitu PKBM dalam menumbuhkembangkan minat belajar warga pada program sekolah kejar paket C yang setara dengan SMA. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah terletak pada masalah yang diteliti pada penelitian tersebut meneliti program taman bacaan masyarakat. Sedangkan penelitian ini meneliti secara keseluruhan terkait manajemen kurikulum dalam meningkatkan mutu pendidikan di PKBM Usaha Mandiri Blitar dan PKBM Alfa Salam Tulungagung.
3. Tika Indah Sari, dalam tesis yang berjudul *"Analisis Efektifitas Pengelolaan Pusat Kegiatan Pembelajaran Masyarakat (PKBM) (Studi Evaluatif Di PKBM Sriwijaya Sawah Lebar Kota Bengkulu) 2013"*.

Adapun fokus penelitian adalah 1) perencanaan pengelolaan pusat kegiatan belajar masyarakat di PKBM, 2) pengorganisasian pengelolaan pusat kegiatan belajar masyarakat di PKBM, 3) pelaksanaan pengelolaan pusat kegiatan belajar masyarakat di PKBM. 4) pengawasan pengelolaan pusat kegiatan belajar masyarakat di PKBM, 5) evaluasi pengelolaan pusat kegiatan belajar masyarakat di PKBM. Hasil penelitian ini, memberikan kesimpulan bahwa pengelolaan PKBM berjalan secara efektif mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan serta evaluasi terhadap program-program yang akan dilaksanakan di PBKM, sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan standar pengelolaan PKBM yang telah ditentukan. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah terkait pembahasan yang mana penelitian ini mengarah kepada keefektifan dalam pengelolaan di PKBM, sedangkan penulis membahas tentang manajemen kurikulum dalam meningkatkan mutu pendidikan di PKBM khususnya program Paket C. Selain itu, terdapat perbedaan yakni metode yang digunakan, pada penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kuantitatif sedangkan penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang menggunakan rancangan multisitus.

4. Sri Siyamsih, dalam tesis yang berjudul *"Pengelolaan Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran Kejar Paket C Di Semarang (Studi Situs di PKBM Sarana Ilmu Semarang) Tahun 2013"*. Adapun fokus penelitian adalah 1) perencanaan penanaman pendidikan karakter dalam

pembelajaran kejar paket C di PKBM, 2) pelaksanaan penanaman pendidikan karakter dalam pembelajaran kejar paket C di PKBM, 3) Penilaian pendidikan karakter dalam pembelajaran kejar paket C di PKBM. Hasil penelitian ini, memberikan kesimpulan bahwa penanaman pendidikan karakter dalam pembelajaran kejar paket C di PKBM Sarana Ilmu Semarang dilakukan oleh tutor dengan menyiapkan nilai-nilai karakter yang tertuang dalam silabus dan RPP. Nilai-nilai tersebut meliputi nilai religi, jujur, disiplin, kreatif, toleransi, dan peduli sosial. Selain itu tutor juga menyiapkan bahan ajar berupa buku paket dari Dinas PLS yang memuat materi dengan tingkat kesulitan rendah serta memuat nilai-nilai karakter bangsa. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah terkait pembahasan yang mana penelitian ini mengarah tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran Kejar Paket C, sedangkan penulis membahas tentang bagaimana manajemen kurikulum dalam meningkatkan mutu pendidikan di PKBM khususnya pada program Paket C.

5. Fajar Nugroho Muttaqin, dalam tesis yang berjudul *"Pengaruh Latar Belakang Diklat Dan Pengalaman Kerja Terhadap Kompetensi Pengelola Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Di Kabupaten Pandeglang Tahun 2016"*. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) pengaruh latar belakang diklat terhadap kompetensi pengelola PKBM, 2) Pengaruh pengalaman kerja terhadap kompetensi pengelola PKBM, 3) Pengaruh latar belakang diklat dan

pengalaman kerja terhadap kompetensi pengelola PKBM. Hasil penelitian ini, memberikan kesimpulan bahwa adanya pengaruh diklat dan pengalaman kerja terhadap kompetensi dalam mengelola PKBM. Sedangkan penelitian ini, penulis membahas tentang manajemen kurikulum dalam meningkatkan mutu pendidikan di PKBM khususnya pada program Paket C serta bagaimana upaya untuk mengembangkan kurikulum tersebut.

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan dilaksanakan dalam penelitian ini adalah terdapat kesamaan lokasi penelitian yaitu Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dengan beberapa fokus penelitian yang berbeda-beda. Sedangkan perbedaan yang mendasar dari beberapa penelitian terdahulu dengan penelitian yang diajukan peneliti adalah mengenai manajemen kurikulum pada pendidikan kesetaraan Paket C untuk meningkatkan mutu pendidikan. Hal ini menarik untuk diteliti yaitu: *pertama*, lama belajar peserta didik menggunakan estimasi tiga tahun yakni setara dengan sekolah formal (SMA/SMK/MA) dan ijazah tersebut bisa digunakan untuk melanjutkan untuk kuliah di perguruan tinggi dan untuk mencari pekerjaan. *Kedua,* Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah memberlakukan kurikulum 2013 sebagai standar Pendidikan Nasional mulai tahun 2018/2019 dengan mengacu pada Permendikbud Nomor 160 tahun 2014 yang memberikan tenggang waktu penerapan Kurikulum 2006 (KTSP) dan wajib menerapkan Kurikulum 2013 di tahun 2018/2019 bagi pendidikan nonformal salah satunya yakni PKBM. *Ketiga*, prestasi yang

diperoleh PKBM baik dari pengelola, tutor, maupun peserta didik (*output*) di pendidikan nonformal. Hal ini, menunjukkan bahwa PKBM yang *notabene* pendidikan nonformal juga mampu menunjukkan prestasi yang membanggakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan serta dapat mencetak SDM yang berkualitas. *Keempat*, meningkatkan motivasi belajar masyarakat (berbagai kalangan dan usia), terutama di daerah pinggiran (pegunungan) yang masih membutuhkan pendidikan. Oleh karena itu, peneliti memiliki celah untuk mengkaji mengenai manajemen kurikulum pada pendidikan kesetaraan Paket C untuk meningkatkan mutu pendidikan yang belum ada pada penelitian-penelitian sebelumnya.

C. Paradigma Penelitian

Paradigma penelitian merupakan kerangka berfikir yang menjelaskan cara pandang peneliti terhadap fakta kehidupan sosial dan perlakuan peneliti terhadap ilmu dan teori.[73] Paradigma Penelitian ini merupakan pijakan untuk membantu peneliti menggali data lapangan sesuai dengan konsep atau teori yang sesuai. Berikut merupakan gambaran paradigma penelitian.

[73] Puspowarsiti, *Metode Penelitian Organisasi dengan Aplikasi Program SPSS*, (Bandung: Buahbatu, 2008), 14.
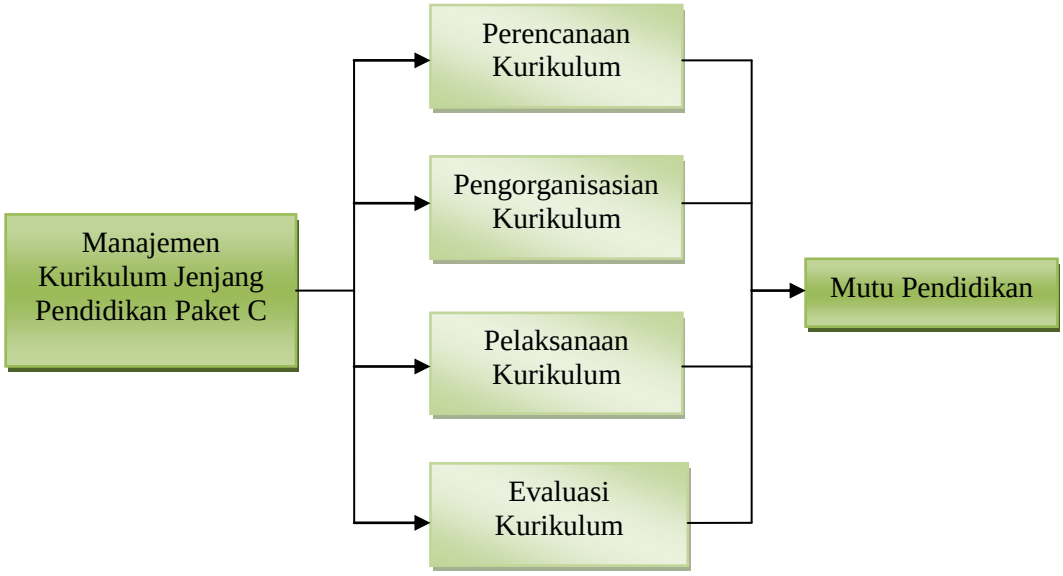
1.3 Gambar landasan teori dalam paradigma penelitian